



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
INSPEKTORAT
KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2019**





Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmad-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dibuat dan disampaikan sehubungan dengan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan surat Bupati Sintang Nomor: 065 / 0197 / OR - C. tanggal 23 Januari 2020 Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja tahun 2020.

Penyusunan dan Pelaporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sintang dimaksudkan untuk memberikan gambaran konkrit atas apa yang telah dilaksanakan selama tahun 2019, yang menyangkut keberhasilan/ kegagalan serta hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 yang telah disusun, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi Inspektorat Kabupaten Sintang dalam meningkatkan Kinerja Pengawasan.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2019 ini dibuat sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

Sintang, Maret 2020
INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG

APOLONARIS BIONG, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP.19600723 198011 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

LKjIP Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2019 melaporkan Capaian Kinerja (*Performance Results*) dengan tetap mengacu pada rencana strategis Inspektorat Kabupaten Sintang Periode 2017-2021. (*Performance Plan*) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sintang dengan capaian 7 (tujuh) sasaran strategis, dengan capaiannya dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Tingkat Capaian Sasaran			
		SB	B	CB	TB
1	Meningkatnya Profesionalisme dan kapasitas Aparat Pengawas.	93,91			
2	Meningkatnya Jumlah Regulasi/kebijakan pengawasan yang diterbitkan.	100			
3	Meningkatnya Penyelesaian Tindak lanjut Temuan hasil pemeriksaan.			67,08	
4	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan berkala.	170,4			
5	Meningkatnya penyelesaian jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.	92,5			
6	Meningkatnya Hasil evaluasi SAKIP SKPD.			60	
7	Meningkatkan SKPD yang bebas Korupsi.		75,77		

Keberhasilan capaian sasaran strategis diukur dengan IKU yang menggambarkan peran Inspektorat Kabupaten Sintang dalam pencapaian visi dan misi pada tingkat Pemerintah Kabupaten. Pengukuran capaian kinerja meliputi pengukuran realisasi 7 (Tujuh) IKU yang paling berpengaruh capaian sasaran strategis dari 15 (lima belas) IKU yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.



Adapun rincian capaian masing-masing sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Capaian sasaran strategis "Meningkatnya Profesionalisme dan kapasitas Aparat Pengawas." sebesar 93,91% tercermin dalam capaian 2 (dua) IKU dengan kategori sangat berhasil.
- 2) Capaian Sasaran strategis "Meningkatnya Jumlah Regulasi/kebijakan pengawasan yang diterbitkan" sebesar 100 % tercermin dalam 1 (satu) IKU dengan kategori sangat berhasil.
- 3) Capaian Sasaran Strategis "Meningkatnya Penyelesaian Tindak lanjut Temuan hasil pemeriksaan" sebesar 67,08% tercermin dalam 4 (empat) IKU yaitu dengan kategori cukup berhasil.
- 4) Capaian Sasaran Strategis "Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan berkala" sebesar 170,4% tercermin dalam 1 (satu) IKU yaitu dengan kategori sangat berhasil.
- 5) Capaian Sasaran Strategis "Meningkatnya penyelesaian jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan" sebesar 92,5% tercermin dalam 1 (satu) IKU yaitu dengan kategori sangat berhasil.
- 6) Capaian Sasaran Strategis "Meningkatnya Hasil evaluasi SAKIP SKPD" sebesar 60% tercermin dalam 2 (dua) IKU yaitu dengan kategori cukup berhasil.
- 7) Capaian Sasaran Strategis "Meningkatkan SKPD yang bebas Korupsi" sebesar 75,77% tercermin dalam 4 (empat) IKU yaitu dengan kategori berhasil.

Beberapa masalah yang dapat menghambat pencapaian target kinerja sasaran antara lain:

- Masih kurangnya anggaran untuk mengikuti pelatihan teknis bagi setiap auditor/pengawas pemerintah.
- Masih kurangnya tenaga fungsional pemeriksa bila dibandingkan dengan jumlah obyek pemeriksaan.
- Kurangnya sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengawasan.



- Lokasi Objek pemeriksaan tersebar di wilayah Kabupaten Sintang.
- Kurangnya kesadaran Objek Pemeriksaan untuk menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan.
- Belum optimalnya tindak lanjut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- Masih kurangnya kebijakan dan prosedur terkait pengawasan sesuai dengan perkembangan permasalahan yang ada

Untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan langkah-langkah

- Mengirim PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti diklat sertifikasi Jabatan Fungsional maupun diklat struktural dan teknis.
- Mengadakan penambahan sarana dan prasarana pendukung guna menunjang kegiatan pemeriksaan.
- Menyusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) sesuai dengan skala prioritas.
- Melaksanakan koordinasi dan pematihan data/tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Meningkatkan koordinasi antara anggota TP-TGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi)



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	Hal i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Sintang	1
B. Maksud dan Tujuan LKjIP 2019	5
C. Permasalahan Utama (<i>STRATEGIC ISSUED</i>)	5
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Tahun 2017 – 2021	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	12
C. Program dan Kegiatan Tahun 2019	19
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Indikator Kinerja	22
B. Realisasi Anggaran Tahun 2019	41
BAB IV : PENUTUP	56
LAMPIRAN –LAMPIRAN	
1. Pengukuran Kinerja Tahun 2019	
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	
3. SK Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG

1. Kedudukan

Sesuai dengan Perda Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 107 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang disebutkan bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah setingkat Badan, dipimpin oleh Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati, dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

a) Tugas Pokok

Memperhatikan Peraturan Bupati Sintang Nomor 107 Tahun 2016, Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Sintang adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

b) Fungsi

Lebih lanjut disebutkan Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan perangkat daerah dan desa;
- Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan;



- Penyelenggaraan Majelis Petimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (MPPKN/D) dan Kesekretariatan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (MPPKN/MPPKD);
- Pengoordinasian kesekretariatan, Inspektur Pembantu dan Auditoriat;
- Pengembangan Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat;
- Penanganan pengaduan masyarakat;
- Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah;
- Penyusunan perjanjian kinerja;
- Penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- Melaksanakan pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi;
- Pelaksanaan administrasi inspektorat;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

c) Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Sintang, terdiri dari:

1. Inspektur
2. Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi;
3. Inspektur pembantu Bidang I;
4. Inspektur pembantu Bidang II;
5. Inspektur pembantu Bidang III;
6. Inspektur pembantu Bidang IV; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



3. Data Kepegawaian dan Perlengkapan

a. Kepegawaian

Inspektorat Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 66 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan komposisi sebagai berikut:

(1) Dari segi kepangkatan/golongan ruang, terdiri dari:

- a) Golongan I : - orang
- b) Golongan II : 2 orang
- c) Golongan III : 44 orang
- d) Golongan IV : 20 orang

(2) Dari segi kualifikasi pendidikan formal, terdiri dari:

- a) S2 : 16 orang
- b) S1 : 44 orang
- c) D3 : 2 orang
- d) SLTA : 3 orang
- e) SLTP : - orang
- f) SD : - orang

(3) Dari segi pegawai yang telah mengikuti Diklat PIM, terdiri dari:

- a) SPAMEN/Pim II : 1 orang
- b) SPAMA/Pim III : 3 orang
- c) ADUM/Pim IV : 10 orang



(4) Dari segi pegawai yang telah mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan lulus sertifikasi Auditor sebanyak 37 orang dan P2UPD sebanyak 12 orang. Dari jumlah tersebut, yang telah memegang Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 34 orang, dengan rincian:

- a) Dalnis : 9 orang
- b) Ketua Tim : 20 orang
- c) Auditor Ahli Anggota Tim : 4 orang
- d) Auditor Penyelia : 1 orang

Adapun rincian PNS yang telah bersertifikasi dan telah memegang Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a) Auditor Ahli terdiri dari:
 - Auditor Utama : - orang
 - Auditor Madya : 9 orang
 - Auditor Muda : 20 orang
 - Auditor Pertama : 4 orang
- b) Auditor Terampil terdiri dari:
 - Auditor Penyelia : 1 orang
 - Auditor Pelaksana Lanjutan: 0 orang
 - Auditor Pelaksana : -orang
- c) P2UPD
 - Pengawas Pemerintahan Madya : 5 orang
 - Pengawas Pemerintahan Muda : 5 orang
 - Pengawas Pemerintahan Pertama : 2 orang



(5) Dari segi jabatan struktural/Eselon sebagai berikut:

- a) Eselon II : 1 orang
- b) Eselon III : 3 orang
- c) Eselon IV : 2 orang

b. Perlengkapan

Keberhasilan dalam penyelenggaraan tugas-tugas bidang pengawasan di Kabupaten Sintang tentu harus didukung sarana dan prasarana kerja yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia dalam rangka mendukung tugas-tugas pengawasan antara lain:

- (1) Lahan kantor seluas 9.706 m²
- (2) 3 (dua) buah kendaraan roda 4 (empat)
- (3) 47 (empat puluh tujuh) buah kendaraan roda 2 (dua)
- (4) 71 (lima puluh dua) unit computer note-book
- (5) 15 (dua belas) unit computer desktop
- (6) 1 (satu) buah kamera digital

4. MAKSUD DAN TUJUAN LKjIP 2019

Penyusunan dan Pelaporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sintang dimaksudkan untuk memberikan informasi dan gambaran konkrit atas apa yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 yang menyangkut keberhasilan/kegagalan serta hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2021 yang telah disusun sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan bagi Inspektorat Kabupaten Sintang dalam meningkatkan kinerja pengawasan.



B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

1. Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Sintang, meliputi :

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH

- a. Masih terdapat temuan hasil pemeriksaan yang belum ditindak lanjuti;
- b. Potensi penyimpangan penggunaan anggaran yang berindikasi terjadi tindak pidana korupsi;
- c. Kurangnya transparansi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Analisis Isu Strategis Inspektorat Kabupaten Sintang

Secara internal Inspektorat Kabupaten Sintang memiliki Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weakneses*) dan secara eksternal Inspektorat Kabupaten Sintang memiliki Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threatment*). Identifikasi masalah-masalah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang dianalisis dan dirumuskan atau dijelaskan secara ringkas masing-masing faktor sebagai berikut :

Kekuatan (*Strenghts*)

1. Adanya dukungan atasan
2. Adanya kerjasama antar bidang
3. Adanya program kerja tahunan
4. Adanya motivasi kerja
5. Adanya uraian tugas

Kelemahan (*Weakneses*)

1. Kurangnya tenaga fungsional
2. Kurangnya dukungan dana
3. Kurangnya sarana dan prasarana
4. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan

Peluang (*Opportunity*)

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan
2. Tersedianya pendidikan dan pelatihan
3. Adanya komitmen dan dukungan dari masyarakat
4. Adanya kerjasama dari instansi terkait



5. Adanya otonomi daerah

Ancaman (*Threatment*)

1. Kondisi geografis yang sulit
2. bertambahnya objek pemeriksaan
3. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
4. Rendahnya supremasi hukum

3. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan Inspektorat mempunyai 9 (sembilan) permasalahan utama (*strategic issued*) yaitu :

1. Jumlah Obyek Pemeriksaan dan cakupan wilayah pengawasan yang luas.

Jumlah obyek pemeriksaan dengan cakupan wilayah pengawasan di Kabupaten Sintang dengan obyek pemeriksaan sebanyak 1036, dengan rincian sebagai berikut :

a) Sekretariat	: 2
b) Kecamatan	: 14
c) Kelurahan	: 16
d) Desa	: 391
e) Badan	: 11
f) Dinas	: 13
g) Kantor	: 2
h) BLUD RSUD	: 1
i) PUSKESMAS	: 20
j) SD	: 424
k) SMP	: 103
l) SKB	: 1
m) PDAM	: 1

2. Jumlah Tenaga Pemeriksa yang belum memadai.

Jumlah Tenaga Pemeriksa yang merupakan tenaga fungsional berjumlah 46 orang yang terdiri 34 orang Fungsional Auditor dan 12 orang Fungsional P2UPD.



Jika dibandingkan dengan jumlah Obyek pemeriksaan maka fungsi pengawasan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal dengan analisa sebagai berikut :

Jumlah pemeriksa minimal berjumlah 4 (empat) orang, maka dapat dibentuk maksimal 10 (sepuluh) tim pemeriksa. Untuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap 999 (Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan) obyek pemeriksaan setiap tim setidaknya harus melaksanakan 100 (seratus) kali pemeriksaan.

Jika 1 (satu) tim hanya dapat melaksanakan 1 (satu) kali pemeriksaan, maka setidaknya dalam 10 (sepuluh) tahun seluruh obyek pemeriksaan dapat diperiksa.

3. Keterbatasan anggaran

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) obyek pemeriksaan oleh 1 (satu) tim pemeriksa diperlukan biaya lebih kurang Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), maka diperlukan anggaran Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah). Pada Tahun Anggaran 2019 anggaran untuk pemeriksaan hanya Rp.5.702.111.100,00-

4. Belum Optimalnya penghimpunan data dan informasi dalam rangka penyusunan Laporan Hasil Pengawasan.
5. Belum optimalnya koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap percepatan pemberantasan korupsi
6. Belum optimalnya mekanisme pengawasan
7. Belum Optimalnya Pemanfaatan Laporan Pengawasan
8. Lokasi obyek Pemeriksaan yang tersebar di wilayah Kabupaten Sintang.
9. Keterbatasan Sarana dan Prasarana



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017-2021

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Sintang tahun 2017-2021 merupakan suatu dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan program yang akan dicapai.

Rencana strategis juga berguna sebagai pedoman atau acuan bagi Inspektorat Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mendukung terlaksananya Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

1. VISI dan MISI, Tujuan dan Sasaran

a) VISI

Visi Kabupaten Sintang adalah, **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Pada Tahun 2021**". Rumusan visi di atas dapat dideskripsikan dari Visi Bupati dan Wakil Bupati.

b) MISI

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar visi yang telah ditentukan dapat tercapai dengan baik. Inspektorat Kabupaten Sintang sesuai dengan kewenangan yang diberikan serta tugas pokok dan fungsinya berkewajiban untuk mendorong pencapaian Misi Kabupaten, yaitu misi urusan ke 6 (enam) :

"Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih"



3. Analisis SWOT dan CSF

Berdasarkan analisis isu strategis Inspektorat Kabupaten Sintang pada Bab I di atas, Inspektorat Kabupaten Sintang memiliki Kekuatan (*Strenghts*) dan Kelemahan (*Weakneses*) dan secara eksternal Inspektorat Kabupaten Sintang memiliki Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threatment*). Identifikasi masalah-masalah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang dianalisis dan dirumuskan atau dijelaskan secara ringkas masing-masing faktor sebagai berikut :

Kekuatan (*Strenghts*)

1. Adanya dukungan atasan
2. Adanya kerjasama antar bidang
3. Adanya program kerja tahunan
4. Adanya motivasi kerja
5. Adanya uraian tugas

Kelemahan (*Weakness*)

1. Kurangnya tenaga fungsional
2. Kurangnya dukungan dana
3. Kurangnya sarana dan prasarana
4. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan

Peluang (*Opportunities*)

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan
2. Tersedianya pendidikan dan pelatihan
3. Adanya komitmen dan dukungan dari masyarakat
4. Adanya kerjasama dari instansi terkait
5. Adanya otonomi daerah

Ancaman (*Threatment*)

1. Kondisi geografis yang sulit
2. Bertambahnya objek pemeriksaan
3. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
4. Rendahnya supremasi hukum



Dari berbagai faktor di atas, maka dapat dirumuskan interaksi pencermatan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

INTERAKSI PENCERMATAN

PENCERMATAN LINGKUNGAN INTERNAL PENCERMATAN LINGKUNGAN EKSTERNAL	Kekuatan (S) 1. Adanya dukungan atasan 2. Adanya kerjasama antar bidang 3. Adanya program kerja tahunan 4. Adanya motivasi kerja 5. Adanya uraian tugas	Kelemahan (W) 1. Kurang tersedianya dana 2. Kurangnya tenaga fungsional 3. Kurangnya sarana dan prasarana 4. Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan
	Peluang (O)	S + O (Pendorong)
1. Tersedianya peraturan perundang-undangan 2. Tersedianya pendidikan dan pelatihan 3. Adanya komitmen dan dukungan dari masyarakat 4. Adanya kerjasama dari instansi terkait 5. Adanya otonomi daerah	1. Dengan adanya dukungan atasan untuk melaksanakan otonomi daerah 2. Melaksanakan PKPT berdasarkan peraturan dan perundang-undangan	1. Meningkatkan SDM yang profesional untuk melaksanakan otonomi daerah 2. Menyiapkan kinerja pengawasan sesuai peraturan dan perundang-undangan
Ancaman (T)	S + T (Status Quo)	W + T (Penghambat)
1. Kondisi geografis yang sulit 2. Bertambahnya objek pemeriksaan 3. Rendahnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 4. Rendahnya supremasi hukum	1. Dengan adanya dukungan atasan untuk menegakkan supremasi hukum 2. Melaksanakan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1. Menyiapkan SDM yang professional untuk menegakkan supremasi hukum 2. Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan



Sasaran 3.1

Meningkatnya SKPD yang Bebas Korupsi.

5. Strategi Sasaran

Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran, Inspektorat melakukan strategi-strategi sebagai berikut:

Strategi Sasaran 1.1 adalah:

- Peningkatan Aparatur Pengawasan yang mengikuti diklat penjenjangan dan lulus diklat.

Strategi Sasaran 1.2 adalah:

- Meningkatkan produk hukum tata kelola pengawasan.

Strategi sasaran 2.1 adalah:

- Pemetaan dan prioritas penyelesaian tindaklanjut temuan pemeriksaan.

Strategi sasaran 2.2 adalah:

- Pemetaan jumlah obrik dan penentuan prioritas pengawasan.

Strategi sasaran 2.3 adalah:

- Penyelesaian jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan.

Strategi sasaran 2.4 adalah:

- Pembinaan dan meningkatkan jumlah SKPD yang dievaluasi.

Strategi Sasaran 3.1 adalah :

- Pemetaan peranan SPIP pada SKPD.
- Meningkatkan Peranan WASKAT pada SKPD.
- Pemetaan SKPD pelayanan yang berpotensi menjadi Wilayah Bebas Korupsi.
- Peningkatan ketaatan LHKPN.

6. Kebijakan Sasaran



Arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Sintang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan terdiri dari:

- Kebijakan Sasaran 1.1 adalah :
 - Pengusulan penambahan formasi pejabat pengawas.
 - Pengiriman Aparatur Pengawasan mengikuti diklat penjenjangan.
 - Pengiriman Aparatur Pengawasan untuk mengikuti diklat substantif.
- Kebijakan atas Sasaran 1.2 adalah
 - Penyusunan regulasi/kebijakan pengawasan.
- Kebijakan atas Sasaran 2.1 adalah :
 - Menyelenggarakan gelar pengawasan dan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan.
 - Menyelenggarakan Sidang Majelis TP-TGR.
 - Penyempurnaan Sistem Informasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
- Kebijakan atas strategi sasaran 2.2 adalah:
 - Melakukan pengawasan berkala/regular, reuiu, evaluasi temuan pengawasan dan monitoring sesuai standar audit dan kode etik pejabat pengawas.
- Kebijakan atas sasaran 2.3 adalah:
 - Melakukan pemeriksaan kasus/khusus berdasarkan skala prioritas.
- Kebijakan atas sasaran 2.4 adalah:
 - Melakukan Pembinaan dan evaluasi kinerja SKPD.
- Kebijakan atas Sasaran 3.1 adalah:
 - Melakukan Sosialisasi dan Kebijakan pelaksanaan SPIP.
 - Bimtek Instrumen unsur/sub unsur SPIP.
 - Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPIP.
 - Koordinasi dan konsultasi penerapan SPIP.
 - Meningkatkan sosialisasi WASKAT.
 - Monitoring/evaluasi penerapan WASKAT.
 - Koordinasi dan Konsultasi WASKAT.
 - Membuat peta reformasi birokrasi.
 - Melakukan usulan penetapan SKPD berpredikat Wilayah Bebas Korupsi.
 - Meningkatkan predikat SKPD WBK menjadi WBBM.
 - Monitoring/Evaluasi SKPD WBK/WBBM.



- Monitoring/evaluasi wajib LHKPN.
- Menetapkan Wajib LHKPN.
- Sosialisasi dan BIMTEK Pengisian LHKPN.

7. Program

Adapun program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Sintang tahun 2017 – 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- e. Program Pengembangan Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- f. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
- g. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; dan
- h. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian kinerja atau kontrak kinerja adalah janji untuk melaksanakan amanat pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan dalam Dokumen Penetapan/Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).



Dokumen penetapan/perjanjian kinerja sebagai dokumen perjanjian kinerja diturunkan dari Renstra dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), melalui proses penganggaran. Ditingkat SKPD dokumen perjanjian kinerja di buat oleh Kepala SKPD, yang berjanji dari Kepala SKPD kepada Bupati untuk mencapai sasaran strategis dan target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD).

1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Rumusan Indikator	Satuan	Keterangan
1	2	3	4	5
Sasaran 1 Meningkatnya Profesionalisme dan kapasitas Aparat Pengawas				
1.	Jumlah Aparat Pengawas (Pejabat Fungsional)	Jumlah Aparat Pengawas (Pejabat Fungsional)	Orang	Output
2.	Jumlah Aparat Pengawas yang mengikuti diklat teknis dan kapabilitas sumber daya Aparatur Pengawasan	Jumlah Aparat yang mengikuti diklat	Orang	Output
Sasaran 2 Meningkatnya Jumlah Regulasi/Kebijakan Pengawasan Yang Diterbitkan				
1.	Jumlah Regulasi/Kebijakan Pengawasan	Jumlah Regulasi/Kebijakan Pengawasan yang diterbitkan	Regulasi	Output
Sasaran 3 Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan				
1.	Prosentase Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	Persentase	Outcome
2.	Prosentase Kerugian Daerah yang selesai ditindaklanjuti	Jumlah Kerugian Daerah yang selesai ditindaklanjuti	Persentase	Output
3.	Jumlah inventarisasi Penetapan TP-TGR (Sidang TP-TGR)	Jumlah inventarisasi Penetapan TP-TGR (Sidang TP-TGR) yang dilaksanakan	Kegiatan	Output
4.	Peningkatan Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang dipelihara	Aplikasi	Output



Sasaran 4 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pengawasan Berkala				
1.	Jumlah Objek pemeriksaan berkala yang diperiksa	Jumlah Objek pemeriksaan berkala yang diperiksa	Obrik	Output
Sasaran 5 Meningkatnya Penyelesaian Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Dengan Pemeriksaan				
1.	Prosentase kasus/khusus yang diperiksa	Jumlah kasus/khusus yang diperiksa	Persentase	Outcome
Sasaran 6 Meningkatnya Hasil Evaluasi SAKIP SKPD				
1.	Jumlah SKPD yang dievaluasi	Jumlah SKPD yang dievaluasi	Persentase	Outcome
2.	Jumlah SKPD dengan nilai SAKIP kategori Baik	Jumlah SAKIP SKPD berkategori Baik	SKPD	Output
Sasaran 7 Meningkatnya SKPD Yang Bebas Korupsi				
1.	Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	SKPD	Output
2.	Jumlah SKPD yang menerapkan WASKAT	Jumlah SKPD yang menerapkan WASKAT	SKPD	Output
3.	Jumlah SKPD yang diusulkan sebagai Zona Integritas atau berstatus WBK/WBBM	Jumlah SKPD berstatus WBK/WBBM	SKPD	Output
4.	Prosentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN	Pejabat yang telah menyampaikan LHKPN	Persentase	Output

2. Perjanjian kinerja

Sasaran-sasaran dalam perjanjian kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen perjanjian Kinerja adalah sebanyak 7 sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sintang.

Masing-masing sasaran yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Sintang tahun 2019. selengkapnya dituangkan dalam formulir Perjanjian Kinerja di bawah ini:

No	Indikator Kinerja Utama	Rumusan Indikator	Target	Satuan	Keterangan
1	2	3		5	6
Sasaran 1 Meningkatnya Profesionalisme dan kapasitas Aparat Pengawas					
1.	Jumlah Aparat Pengawas (Pejabat Fungsional)	Jumlah Aparat Pengawas (Pejabat Fungsional)	49	Orang	Output
2.	Jumlah Aparat Pengawas yang	Jumlah Aparat yang mengikuti diklat	60 JFA 14 Non	Orang	Output



	mengikuti diklat teknis dan kapabilitas sumber daya Aparatur Pengawasan		JFA		
Sasaran 2 Meningkatnya Jumlah Regulasi/Kebijakan Pengawasan Yang Diterbitkan					
1.	Jumlah Regulasi/Kebijakan Pengawasan	Jumlah Regulasi/Kebijakan Pengawasan yang diterbitkan	2	Regulasi	Output
Sasaran 3 Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan					
1.	Prosentase Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	80%	Persentase	Outcome
2.	Prosentase Kerugian Daerah yang selesai ditindaklanjuti	Jumlah Kerugian Daerah yang selesai ditindaklanjuti	47%	Persentase	Output
3.	Jumlah inventarisasi Penetapan TP-TGR (Sidang TP-TGR)	Jumlah inventarisasi Penetapan TP-TGR (Sidang TP-TGR) yang dilaksanakan	1	Kegiatan	Output
4.	Peningkatan Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang dipelihara	1	Aplikasi	Output
Sasaran 4 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pengawasan Berkala					
1.	Jumlah Objek pemeriksaan berkala yang diperiksa	Jumlah Objek pemeriksaan berkala yang diperiksa	125	Obrik	Output
Sasaran 5 Meningkatnya Penyelesaian Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Dengan Pemeriksaan					
1.	Prosentase kasus/khusus yang diperiksa	Jumlah kasus/khusus yang diperiksa	60%	Persentase	Outcome
Sasaran 6 Meningkatnya Hasil Evaluasi SAKIP SKPD					
1.	Jumlah SKPD yang dievaluasi	Jumlah SKPD yang dievaluasi	100%	Persentase	Outcome
2.	Jumlah SKPD dengan nilai SAKIP kategori Baik	Jumlah SAKIP SKPD berkategori Baik	30	SKPD	Output
Sasaran 7 Meningkatnya SKPD Yang Bebas Korupsi					
1.	Jumlah SKPD yang	Jumlah SKPD yang	43	SKPD	Output



	menerapkan SPIP	menerapkan SPIP			
2.	Jumlah SKPD yang menerapkan WASKAT	Jumlah SKPD yang menerapkan WASKAT	43	SKPD	Output
3.	Jumlah SKPD yang diusulkan sebagai Zona Integritas atau berstatus WBK/WBBM	Jumlah SKPD berstatus WBK/WBBM	3	SKPD	Output
4.	Prosentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN	Pejabat yang telah menyampaikan LHKPN	80%	Persentase	Output

3. Program dan Kegiatan

Program Kegiatan Inspektorat Kabupaten Sintang sebagai penjabaran dari Sasaran Strategis pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan jasa surat menyurat.2. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.3. Belanja jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.4. Penyediaan jasa kebersihan kantor.5. Penyediaan ATK.6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.9. Penyediaan makanan dan minuman.10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah11. Penyediaan Tenaga Kontrak12. Pameran Pembangunan13. Rapat Koordinasi dan pembinaan kedalam daerah14. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas15. Penataan Dokumen Arsip.
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	<ol style="list-style-type: none">1. Pengadaan mebeleur2. Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor.3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor6. Pengadaan perangkat komputer dan printer.7. Pemeliharaan rutin Perangkat Komputer dan Printer.8. Pengadaan Alat Ukur.9. Pembangunan Jalan Gedung Kantor.



3	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan dan Pelatihan.2. Penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Auditor
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.2. Penyusunan laporan keuangan semesteran.3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.4. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah5. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan
5	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoring/pemantauan tindak lanjut.2. Inventarisasi temuan pengawasan3. Pemeliharaan program SIM-HP.4. Inventarisasi Penetapan TPTGR5. Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala pada kesekretariatan, kecamatan dan kelurahan.6. Audit Alokasi Dana Desa.7. Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala pada ada dinas dan lembaga teknis daerah.8. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan.9. Penanganan kasus pengaduan dilindungi pemerintah daerah.10. Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya.11. Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah.12. Evaluasi Atas Implementasi SAKIP.13. Reviu RKA14. Reviu LKjIP/LAKIP15. Pencanaan Zona Integritas16. Sapu Bersih Pungutan Liar17. Probitiy Audit18. Penanganan Laporan Gratifikasi19. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi20. Pelaksanaan Penguatan dan Evaluasi Penerapan SPIP21. Laporan LHKPN/LHKASN22. Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK)23. Audit Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 201924. Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)25. Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)26. Review Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah27. Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
6	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.	<ol style="list-style-type: none">1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.2. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.3. Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Aparatur



		Pengawasan
		4. Pelaksanaan Penguatan Kapabilitas APIP
7	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.	1. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. 2. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program Pengawasan Semesteran dan Tahunan



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus

$$\text{CapaianIndikatorKinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus

$$\text{CapaianIndikatorKinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{CapaianIndikatorKinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.



Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang digunakan.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcome yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan

Nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Range	Penilaian
85 s.d 100	Sangat Berhasil
$70 \leq x < 85$	Berhasil
$55 \leq x < 70$	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Sedangkan penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu menggunakan "Metode Rata-rata Tertimbang Data Kelompok". Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu:

Nilai Tengah	Penilaian
92,5%	Sangat Berhasil
77,5%	Berhasil
62.5%	Cukup Berhasil
27.5%	Tidak Berhasil

Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu rata-rata dari Hasil Perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut.



$$\text{Rumus} = \frac{(\text{JumlahNilaiKelompokKategori} \times \text{MeanKategori})}{\text{JumlahIndikator}} \times 100\%$$

b. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil Pengukuran Kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam Renstra. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil (*Outcome*).

Pengukuran Kinerja yang dilakukan mencakup kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir pengukuran kinerja (PK).

Indikator Input adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator Input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah yaitu besaran dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dan penggunaan SDM.

Indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan, seperti jumlah laporan hasil bimbingan teknis, LKjIP, Laporan Keuangan, Laporan Hasil Evaluasi, Audit yang diterbitkan dan sebagainya.

Indikator Outcome adalah indikator yang menggambarkan berfungsinya suatu output, antara lain prosentase peningkatan jumlah temuan yang ditindaklanjuti atau prosentase meningkatnya pelayanan pengaduan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian indikator kinerja pada level sasaran Inspektorat Kabupaten Sintang tahun 2019 adalah sebagai berikut:



No	Sasaran Strategis	Tingkat Capaian Sasaran			
		SB	B	CB	TB
1	Meningkatnya Profesionalisme dan kapasitas Aparat Pengawas.	93,91			
2	Meningkatnya Jumlah Regulasi/kebijakan pengawasan yang diterbitkan.	100			
3	Meningkatnya Penyelesaian Tindak lanjut Temuan hasil pemeriksaan.			67,08	
4	Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan berkala.	170,4			
5	Meningkatnya penyelesaian jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.	92,5			
6	Meningkatnya Hasil evaluasi SAKIP SKPD.			60	
7	Meningkatkan SKPD yang bebas Korupsi.		75,77		

Dari 7 sasaran yang ada, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sangat berhasil	4	Sasaran	(57,14%)
- Berhasil	1	Sasaran	(14,28%)
- Cukup Berhasil	2	Sasaran	(28,57%)
- Tidak Berhasil	<u>0</u>	Sasaran	(0 %)
Jumlah	7	Sasaran	(100 %)

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada bagian evaluasi kinerja berikut ini

2. Evaluasi Kinerja dan Analisis Kinerja

Sasaran 1.Meningkatnya Profesionalisme dan Kapasitas Aparat Pengawas

Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2019 sebesar Rp. **784.575.820,00** telah terealisasi senilai Rp. **752.043.398,00** atau **95,85%** dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:



Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Meningkatnya Profesionalisme dan kapasitas Aparat Pengawas.	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	181.250.000	181.250.000	177.041.300	97,68%
	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian akuntabilitas Kinerja	381.430.000	369.930.000	351.053.878	94,90%
	Peningkatan Kapabiliats Sumber daya Aparatur	66.754.320	202.454.320	194.656.720	96,15%
	Total	629.434.320	753.634.320	722.751.898	96,24%

Kinerja Sasaran "Meningkatnya Profesionalime dan kapasitas Aparat Pengawas" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	Jumlah Aparat Pengawas (Pejabat Fungsional)	Orang	49	49	100	Output
2	Jumlah Aparat Pengawas yang mengikuti diklat teknis dan kapabilitas sumber daya Aparatur Pengawasan	Orang	60 JFA 14 Non JFA	49 JFA 16 Non JFA	87,83	Output
Capaian Sasaran					93,91	

Dilihat dari capaian indikator sasaran Outcome yang terdiri dari 2 (Dua) indikator di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan **Sangat Berhasil (93,91%)**, yang dapat diuraikan sebagai berikut:



1) Jumlah Aparat Pengawas (Pejabat Fungsional)

Capaian Kinerja sebesar 100% yaitu Indikator Kinerja berupa Jumlah Aparat Pengawas (Pejabat Fungsional) diperoleh dari Jumlah Pejabat Pengawas di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang. Indikator prosentase jumlah aparat pengawas adalah indikator yang dimaksudkan untuk mengukur jumlah atau banyaknya aparat pengawas yang ada di Inspektorat Kabupaten Sintang.

Pada tahun 2019 terdapat penambahan jumlah aparat pengawas sebanyak 4 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, tidak terdapat penambahan jumlah aparat pengawas, sehingga capaian atas indikator pada tahun 2018 dapat ditingkatkan pada tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan target Renstra sebesar 49 orang maka pada tahun 2019 sebesar 49 orang, jumlah aparat pengawas tahun 2019 telah memenuhi target.

2) Jumlah Aparat Pengawas yang mengikuti diklat teknis dan kapabilitas sumber daya Aparatur Pengawasan

Prosentase Jumlah Aparat Pengawas yang mengikuti diklat teknis dan kapabilitas sumber daya Aparatur Pengawasan dengan capaian 87,83 % diperoleh dengan membandingkan Jumlah Aparat Pengawas yang mengikuti diklat teknis dan kapabilitas sumber daya Aparatur Pengawasan dibandingkan dengan Total Pejabat Fungsional yang ada di Inspektorat Kabupaten Sintang.

Indikator prosentase Aparat Pengawas yang mengikuti diklat teknis dan kapabilitas sumber daya Aparatur Pengawasan dimaksudkan untuk mengukur dan menjamin setiap Tenaga Fungsional sudah dibekali keahlian sesuai standar (sertifikasi) sesuai pangkat/golongan dan jabatannya dalam tugas pengawasan.

Realisasi kinerja tahun 2018 sebesar 100% tidak mampu dipertahankan kembali di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah aparat pengawas sebenarnya belum terealisasi untuk yang mempunyai pangkat/golongan yang sesuai jabatan fungsional berdasarkan sertifikasi penjurangan dan penambahan jumlah aparat.



Bila dibandingkan dengan indikator kinerja di dalam Renstra tahun 2019 sebesar 87,83% menggambarkan bahwa belum memenuhi target.

Sasaran 2. Meningkatnya Jumlah Regulasi/Kebijakan Pengawasan Yang Diterbitkan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2019 sebesar **Rp. 1.953.500,00** yang telah terealisasi senilai **Rp.0 atau 0%** dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1.953.500	1.953.500	-	0
	TOTAL	1.953.500	1.953.500	-	0

Kinerja Sasaran "Meningkatnya Jumlah Regulasi/Kebijakan Pengawasan Yang Diterbitkan" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah Regulasi/Kebijakan Pengawasan	Regulasi	2	2	100%	Output
Capaian sasaran					100%	

Indikator kinerja jumlah regulasi/kebijakan pengawasan dapat mencapai realisasi sebesar 2 (dua) regulasi dari target sebesar 2 (dua) pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa, target regulasi pada tahun 2019 telah mencapai target Renstra.



Sedangkan Perbandingan Indikator Kinerja Output terhadap tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			+/-	%
			2017	2018	2019		
1.	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Buah	1	0	2	+2	200%

Regulasi atau kebijakan sistem prosedur pengawasan yang diterbitkan oleh Inspektorat Kabupaten Sintang pada tahun 2019 berjumlah 2 (dua) buah, yaitu:

- Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada Inspektorat Kabupaten Sintang, dan
- Peraturan Bupati Sintang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Realisasi kinerja pada tahun 2019 memperoleh capaian 100% dari target yang ditetapkan dan terjadi peningkatan dari tahun 2018 yang tidak teralisasi.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra sebesar 2 (dua) regulasi maka pada tahun 2019 telah memenuhi target.

Sasaran 3. Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2019 sebesar Rp. **715.582.280,00** yang telah terealisasi senilai Rp. **624.445.898,00** atau **74,82%** dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:



Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Monitoring/ Pemantauan Tindak Lanjut	360.580.000	360.580.000	360.145.000	99,88
	Inventarisasi Temuan Pengawasan	259.871.680	259.871.680	258.300.898	99,40
	Pemeliharaan Program SIMHP	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100
	Inventarisasi Penetapan TPTGR	96.880.600	89.130.600	0	0
	TOTAL	723.332.280	715.582.280	624.445.898	74,82

Kinerja Sasaran "Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Prosentase Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	%	80	68,20	68,20	Outcome
2.	Prosentase Kerugian Daerah yang selesai ditindaklanjuti	%	47	47,53	100,12	Output
3.	Jumlah inventarisasi Penetapan TP-TGR (Sidang TP-TGR)	Kegiatan	1	0	0	Output
4.	Peningkatan Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Aplikasi	1	1	100	Output
Capaian sasaran					67,08%	

Dilihat dari capaian indikator sasaran yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja outcome dan 3 (tiga) indikator output dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Prosentase Jumlah Temuan Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti sebesar 68,20% belum memenuhi target Renstra sebesar 80%



- 2) Prosentase Kerugian Daerah yang selesai ditindaklanjuti sebesar 47,53% telah memenuhi target Renstra sebesar 47%
- 3) Jumlah inventarisasi Penetapan TP-TGR (Sidang TP-TGR) dengan capaian 0 (nol) kegiatan belum memenuhi target Renstra sebesar 1 (satu) kegiatan.
- 4) Peningkatan Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan capaian 1 (satu) aplikasi sudah memenuhi target Renstra sebesar 1 (satu) aplikasi.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran outcome dapat dikategorikan **Cukup Berhasil (68,20%)**. Keberhasilan Inspektorat Kabupaten Sintang selama tahun 2019 dalam memberikan dan menjalankan sasaran ini sebagaimana ditunjukkan pada capaian indikator sasaran di atas secara ringkas diuraikan sebagai berikut:

1. Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal

Capaian sebesar 68,20% merupakan perbandingan Jumlah Rekomendasi yang sudah tuntas ditindaklanjuti atas Laporan Pemeriksaan Eksternal maupun Internal sampai akhir tahun 2019 dibandingkan dengan Jumlah total rekomendasi hasil pemeriksaan internal maupun eksternal sampai akhir 2019. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur peranan Inspektorat Kabupaten Sintang secara khusus dan Pemerintah Kabupaten Sintang secara umum dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa eksternal dan internal.

Dari capaian kinerja sebesar 68,20% menyatakan hasil kegiatan Laporan Monitoring/pemantauan tindak lanjut, Laporan Inventarisasi TP-TGR dan Laporan Inventarisasi Temuan Pengawasan dilakukan analisa prosentase capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal/internal dengan rincian sebagai berikut:

- Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK 80,71% (dari Laporan BPK semester II tahun 2019)
- Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP 22,03%



- Prosentase tindak lanjut hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi 100%
- Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan ITJEN Kesehatan 100%
- Prosentase tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang 38,29%

Sedangkan Perbandingan Indikator Kinerja Output terhadap tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			+/-	%
			2017	2018	2019		
1.	Jumlah Laporan Monitoring / Pemantauan Tindak Lanjut	LHM	45	35	42	+7	120%
2.	Laporan Inventarisasi Penetapan TPTGR	LAP	1	5	0	-5	-500%
3.	Laporan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Keg.	6	6	6	-	100%
4.	SIMHP	Apk	1	1	1	-	100%

Dari hasil analisa penyebab masih rendahnya kinerja ditemui kendala atau permasalahan seperti:

- Kurangnya sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengawasan.
- Lokasi Objek pemeriksaan tersebar di wilayah Kabupaten Sintang.
- Kurangnya kesadaran Objek Pemeriksaan untuk menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan.
- Belum optimalnya tindak lanjut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan.



Oleh karena itu, langkah-langkah untuk mengatasi masalah rendahnya kinerja tersebut antara lain :

- Mengadakan penambahan sarana dan prasarana pendukung guna menunjang kegiatan pemeriksaan.
- Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sesuai dengan skala prioritas.
- Meningkatkan koordinasi antara anggota TP-TGR agar kasus-kasus pelanggaran yang penyelesaiannya direkomendasikan melalui jalur TP-TGR dapat segera ditindaklanjuti.

Sasaran 4 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pengawasan Berkala

Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2019 sebesar Rp. **2.036.951.100,00** yang telah terealisasi senilai Rp. **2.036.951.100** atau **98,59%** dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala pada dinas dan lembaga teknis daerah	487.235.000	427.235.000	427.235.000	100%
	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala pada kesekretariatan, kecamatan dan kelurahan	174.060.000	174.060.000	174.025.000	99%
	Audit Alokasi Dana Desa	487.730.000	487.730.000	487.720.000	99%
	Reviu RKA	38.788.400	38.788.400	37.738.400	97,2%
	Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK)	200.000.000	200.000.000	199.205.000	99,6%



Audit Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2019	-	164.925.000	164.925.000	100%
Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	199.420.000	199.420.000	196.130.000	98,35%
Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	38.5995.700	38.5995.700	37.720.700	97,7%
Pelaksanaan Penguatan dan Evaluasi Penerapan SPIP	38.848.000	38.848.000	36.642.000	94,32%
Audit Manajemen Kepegawaian	38.595.700	38.595.700	37.995.700	98,44%
Audit Tata Kelola Teknologi Informasi	38.595.700	38.595.700	38.270.700	99,15%
Evaluasi Berkala Hasil Temuan Pengawasan	100.565.000	100.565.000	100.565.000	100%
Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Reviu Rencana Kerja Pembanguna Daerah (RKPD)	-	99.679.400	98.778.600	99%
TOTAL	2.189.833.500	2.036.951.100	2.036.951.100	98,59%

Kinerja Sasaran "Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pengawasan Berkala" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah pemeriksaan berkala yang diperiksa	Obrik	125	213	170,4%	Outcome
Capaian sasaran					170,4%	

Capaian sebesar 170,4%% merupakan perbandingan dari total rencana pengawasan yang tertuang dalam target Renstra (125 obrik) yaitu kegiatan Pengawasan pada Dinas dan LTD; Pengawasan pada Kesekretariatan, Kecamatan dan Kelurahan; Audit Alokasi Dana Desa; Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah; dan Evaluasi LAKIP, terhadap total realiasi pengawasan (213 obrik). Jadi, dapat disimpulkan bahwa target sasaran pemeriksaan berkala yang diperiksa belum memenuhi target Renstra yang telah ditetapkan sebesar 125 (seratus dua puluh lima) obrik.

Sedangkan Perbandingan Indikator Kinerja Output terhadap tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			+/-	%
			2017	2018	2019		
1.	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala pada dinas dan lembaga teknis daerah	LHP	38	35	13	-23	92
2.	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala pada kesekretariatan, kecamatan dan kelurahan	LHP	11	12	13	+1	109
3.	Audit Alokasi Dana Desa	LHP	49	24	38	-25	48
4.	Reviu RKA	LHR	1	1	0	0	0
5.	Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK)	LHP	-	-	6	+6	600
6.	Audit Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2019	LHA	-	-	25	+25	250



7.	Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	LHP	-	-	113	+113	113
8.	Jumlah Laporan Reviu atas Laporan Keuangan	LHR	1	1	1	0	0
9.	Audit Manajemen Kepegawaian	LAP	-	-	1	+1	100
10.	Audit Tata Kelola Teknologi Informasi	LAP	-	-	1	+1	100

Sasaran 5 Meningkatnya Penyelesaian Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Dengan Pemeriksaan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2019 sebesar Rp. **1.112.045.800,00** yang telah terealisasi senilai Rp. **1.075.079.560,00** atau **91,09%** dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut:

Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Laporan Pemeriksaan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah	1.030.480.000	764.780.000	746.920.000	97,66
	Jumlah Laporan Penangan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintahan dibawahnya	72.331.700	72.331.700	64.861.700	89,67
	Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan	274.934.100	274.934.100	263.297.860	85,94



	Publik Nasional (SP4N)				
	TOTAL	1.377.745.800	1.112.045.800	1.075.079.560	91,09

Kinerja Sasaran "Meningkatnya Penyelesaian Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Dengan Pemeriksaan" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Prosentase kasus/khusus yang diperiksa	%	60	92,5	92,5	Outcome
Capaian sasaran					92,5%	

Capaian sasaran sebesar 92,5% diperoleh dari prosentase perbandingan Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan atas penanganan pengaduan di lingkungan pemerintah daerah sebesar 39 kasus terhadap jumlah Pengaduan yang masuk sebesar 41 kasus.

Namun demikian apabila dibandingkan dengan jumlah target sebagaimana yang tercantum dalam rencana anggaran dan PKPT sebesar 26 kasus maka capaian sasaran bisa mencapai 150%. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target Renstra sebesar 60% maka Prosentase Kasus/Khusus yang diperiksa telah melebihi target sebesar 92,5%

Sedangkan Perbandingan Indikator Kinerja Output terhadap tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			+/-	%
			2017	2018	2019		
1.	Jumlah Laporan Pemeriksaan kasus pengaduan di	LHP	16	19	26	+17	136,84%



	lingkungan Pemerintah Daerah						
2.	Jumlah Laporan Penangan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintahan dibawahnya	LHP	11	1	1	0	100

Sasaran 6 Meningkatnya Hasil Evaluasi SAKIP SKPD

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2019 sebesar Rp. **408.415.000,00** yang telah terealisasi senilai Rp. **392.165.000,00** atau **96,02%** dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Laporan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP	408.415.000	408.415.000	392.165.000	96,02
	Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	77.122.800	77.122.800	71.397.800	92,57
TOTAL		485.537.800	485.537.800	463.562.800	94,29

Kinerja Sasaran "Meningkatnya Hasil Evaluasi SAKIP SKPD" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah SKPD yang dievaluasi	%	100	100	100	Outcome
2..	Jumlah SKPD dengan nilai SAKIP kategori Baik	SKPD	30	6	20	Output
Capaian sasaran					60%	



Capaian sasaran sebesar 100% merupakan prosentase dari perbandingan Laporan Evaluasi atas Implementasi Lakip 43 Obrik penyusun LKjP terhadap Target Obrik penyusun LKjIP sebesar 43 Obrik. Indikator kinerja ini apabila dibandingkan dengan target Renstra, maka dapat disimpulkan telah memenuhi target yaitu 100%. Selain itu, indikator jumlah SKPD dengan nilai SAKIP berkategori baik dengan target 30 SKPD, hanya dapat terealisasi sebesar 6 SKPD. Hal ini menunjukkan bahwa indikator ini belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sedangkan Perbandingan Indikator Kinerja Output terhadap tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			+/-	%
			2017	2018	2019		
1.	Laporan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP	LHE	35	34	43	+9	126,47
2.	Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah	LHR	1	2	2	-	100

Sasaran 7 Meningkatnya SKPD yang Bebas Korupsi

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas dianggarkan dana pendukung yang bersumber dari APBD tahun 2019 sebesar Rp. **482.912.100,00** yang telah terealisasi senilai Rp. **470.811.703,00** atau **97,49%** dari pagu Anggaran. Adapun rincian program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah:

Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian	Pencanangan Zona Integritas	102.199.000	78.974.000	75.581.205	95,70%
	Laporan LHKPN/LHKASN	75.571.000	98.811.000	97.806.000	98,98%
	Sapu Bersih Pungutan Liar	90.360.000	90.360.000	88.135.000	97,53%



Pelaksanaan Kebijakan KDH	Probit Audit	43.595.700	43.595.700	42.995.700	98,62%
	Penanganan Laporan Gratifikasi	97.919.700	97.919.700	97.919.700	100%
	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	34.403.700	34.403.700	31.732.098	92,23%
	Pelaksanaan Penguatan dan Evaluasi Penerapan SPIP	38.848.000	38.848.000	36.642.000	94,32%
TOTAL		482.897.100	482.912.100	470.811.703	97,49%

Kinerja Sasaran "Meningkatnya SKPD Yang Bebas Korupsi" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	SKPD	43	100	100	Output
2.	Jumlah SKPD yang menerapkan WASKAT	SKPD	43	100	100	Output
3.	Jumlah SKPD yang diusulkan sebagai Zona Integritas atau berstatus WBK/WBBM	SKPD	3	0	0	Output
4.	Prosentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN	Persentase	80%	82,5	103,1	Output
Capaian sasaran					75,77%	

Berdasarkan data di atas, sasaran meningkatnya SKPD yang bebas korupsi dapat disimpulkan sebagai berikut :



- Indikator Kinerja jumlah SKPD yang menerapkan SPIP terealisasi sebesar 100% dan telah memenuhi target yang ada dalam Renstra.
- Indikator Kinerja jumlah SKPD yang menerapkan WASKAT terealisasi sebesar 100% dan telah memenuhi target yang ada dalam Renstra.
- Indikator Kinerja jumlah SKPD yang diusulkan sebagai zona integritas atau berstatus WBK/WBBM sebesar 0% dan belum memenuhi target yang ada dalam Renstra.
- Indikator Kinerja Prosentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN terealisasi sebesar 82,5% dan telah memenuhi target yang ada dalam Renstra.

Sedangkan Perbandingan Indikator Kinerja Output terhadap tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			+/-	%
			2017	2018	2019		
1.	Jumlah Laporan Pencanaan Zona Integritas	LAP	5	0	10	+5	500
2.	Jumlah Laporan LHKPN/LKHASN yang disusun	LAP	1	1	1	-	100
3.	SKPD yang bebas dari pungutan liar	LAP	33	17	9	-8	52
4.	Jumlah Laporan Probity Audit	LAP	2	2	2	-	100
5.	Jumlah Laporan Penanganan Gratifikasi	LAP	18	18	18	-	100
6.	Jumlah Laporan Penilaian Reformasi Birokrasi	LAP	1	1	1	-	100
7.	Jumlah Laporan dan Evaluasi Penerapan SPIP	LAP	2	2	2	-	100



B. REALISASI ANGGARAN

1) Laporan Realisasi Anggaran dan Penjelasannya

Pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2019 pada Inspektorat Kabupaten Sintang dalam penggunaan anggaran Belanja Daerah baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung dari pagu anggaran sebesar **Rp.14.789.676.891,00** terserap sebesar **Rp.13.671.517.016,00 (92%)** dengan rincian sebagai berikut:



Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.00.00.5.1] Belanja Tidak Langsung -					
5110101	Gaji pokok PNS/uang representasi	3.406.893.291,00	3.250.327.360,00	156.565.931,00	95%
5110102	Tunjangan keluarga	462.376.000,00	358.365.544,00	104.010.456,00	78%
5110103	Tunjangan jabatan	176.201.036,00	96.390.000,00	79.811.036,00	55%
5110104	Tunjangan fungsional	494.404.557,00	451.200.000,00	43.204.557,00	91%
5110105	Tunjangan fungsional umum	76.650.000,00	34.640.000,00	42.010.000,00	45%
5110106	Tunjangan beras	249.124.800,00	182.281.140,00	66.843.660,00	73%
5110107	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	11.750.000,00	5.038.716,00	6.711.284,00	43%
5110108	Pembulatan gaji	232.044,00	45.063,00	186.981,00	19%
5110109	Jaminan Kesehatan	131.701.363,00	92.830.887,00	38.870.476,00	70%
5110122	Jaminan Kematian	30.000.000,00	20.068.154,00	9.931.846,00	67%
5110123	Jaminan Keselamatan Kerja	12.000.000,00	6.689.376,00	5.310.624,00	56%
5110201	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1.768.660.000,00	1.445.360.000,00	323.300.000,00	82%
Sub Jumlah		6.819.993.091,00	5.943.236.240,00	876.756.851,00	87%
0.40	PEMERINTAHAN UMUM				
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.01.001.5.2] Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa surat menyurat					
5220103	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	3.300.000,00	3.291.000,00	9.000,00	100%
5220307	Belanja Paket/ Pengiriman	3.750.000,00	2.522.501,00	1.227.499,00	67%
5220309	Belanja Jasa Administrasi Keuangan/Bank	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		8.750.000,00	7.513.501,00	1.236.499,00	86%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.01.002.5.2] Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					
					#DIV/0!
5220301	Belanja telepon/faksimili/Radio	3.600.000,00	1.413.165,00	2.186.835,00	39%
5220302	Belanja Air	1.500.000,00	895.945,00	604.055,00	60%
5220303	Belanja Listrik	102.898.800,00	90.559.682,00	12.339.118,00	88%
5220306	Belanja internet/bandwitch	14.400.000,00	12.394.293,00	2.005.707,00	86%
Sub Jumlah		122.398.800,00	105.263.085,00	17.135.715,00	86%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.01.006.5.2] Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional					
5220505	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	14.195.000,00	14.142.300,00	52.700,00	100%
Sub Jumlah		14.195.000,00	14.142.300,00	52.700,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.01.008.5.2] Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan jasa kebersihan kantor					
5220104	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.614.755,00	3.614.755,00	0,00	100%
Sub Jumlah		3.614.755,00	3.614.755,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.01.010.5.2] Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan alat tulis kantor					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	66.556.375,00	66.554.775,00	1.600,00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	12.705.000,00	12.705.000,00	0,00	100%



Sub Jumlah		80.911.375,00	80.909.775,00	1.600,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.01.011.5.2] Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	
5220601	Belanja Penggandaan	36.366.000,00	36.365.670,00	330,00	100%
5220602	Belanja Penjilidan	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	100%
5220603	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	7.860.470,00	7.728.420,00	132.050,00	98%
Sub Jumlah		47.256.470,00	47.124.090,00	132.380,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.01.012.5.2] Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor					
5220102	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.091.200,00	3.091.200,00	0,00	100%
Sub Jumlah		3.091.200,00	3.091.200,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.01.015.5.2] Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					
5220305	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.780.000,00	5.760.000,00	1.020.000,00	85%
Sub Jumlah		6.780.000,00	5.760.000,00	1.020.000,00	85%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.01.017.5.2] Penyediaan makanan dan minuman - Penyediaan makanan dan minuman					
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	33.561.600,00	33.561.600,00	0,00	100%
Sub Jumlah		33.561.600,00	33.561.600,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.01.018.5.2] Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100%
5220105	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	24.028.000,00	18.171.215,00	5.856.785,00	76%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	654.448.000,00	654.437.594,00	10.406,00	100%
Sub Jumlah		687.976.000,00	682.108.809,00	5.867.191,00	99%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.01.019.5.2] Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah - Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah					
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.980.000,00	21.375.000,00	605.000,00	97%
Sub Jumlah		21.980.000,00	21.375.000,00	605.000,00	97%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.01.020.5.2] Penyediaan tenaga kontrak - Penyediaan tenaga kontrak					
5210201	Gaji Pegawai Tidak Tetap	129.600.000,00	122.100.000,00	7.500.000,00	94%
5210301	Jaminan Kesehatan Pegawai Tidak Tetap	11.486.400,00	10.438.200,00	1.048.200,00	91%
5210302	Jaminan Kematian Pegawai Tidak Tetap	1.728.000,00	361.200,00	1.366.800,00	21%
5210303	Jaminan Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	576.000,00	288.960,00	287.040,00	50%
Sub Jumlah		143.390.400,00	133.188.360,00	10.202.040,00	93%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.01.021.5.2] Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas - Penyediaan bahan bakar					



minyak (BBM) dan gas					
5220105	Belanja Bahan Bahan Bakar Minyak/Gas	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00	0%
Sub Jumlah		1.368.000,00	0,00	1.368.000,00	0%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.01.023.5.2] Penataan dokumen arsip - Penataan dokumen arsip					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	39.880.000,00	39.880.000,00	0,00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	1.637.000,00	1.637.000,00	0,00	100%
5220104	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	225.000,00	225.000,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	1.835.400,00	1.835.400,00	0,00	100%
Sub Jumlah		43.577.400,00	43.577.400,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.02.010.5.2] Pengadaan mebeleur - Pengadaan mebeleur					
5231301	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	100%
5231303	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	100%
5231306	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100%
5231307	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	8.855.000,00	8.855.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		51.055.000,00	51.055.000,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.02.011.5.2] Pengadaan perangkat komputer dan printer - Pengadaan perangkat komputer dan printer					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	825.000,00	825.000,00	0,00	100%
5210102	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	100%
5210104	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang / Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100%
5210107	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	100%
5231203	Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	50.800.000,00	50.800.000,00	0,00	100%
5231204	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	132.330.000,00	132.330.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		211.255.000,00	211.255.000,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.02.012.5.2] Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor -					
5231106	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100%
5231701	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal	9.150.000,00	9.075.000,00	75.000,00	99%
5231709	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	50.850.000,00	50.765.000,00	85.000,00	100%
Sub Jumlah		132.000.000,00	131.840.000,00	160.000,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.02.022.5.2] Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	825.000,00	825.000,00	0,00	100%
5220201	Belanja bahan baku pembangunan (swakelola)	34.289.000,00	34.289.000,00	0,00	100%
5220317	Belanja Jasa Tenaga Tukang	17.875.000,00	17.875.000,00	0,00	100%
5232731	Belanja Modal Pengadaan	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	100%



	Konstruksi/Pembelian bangunan lainnya				
Sub Jumlah		182.989.000,00	182.989.000,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.02.024.5.2] Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					
5220501	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100%
5220502	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.000.000,00	29.100.000,00	900.000,00	97%
5220503	Belanja Bahan Pelumas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		52.500.000,00	51.600.000,00	900.000,00	98%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.02.026.5.2] Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor					
5222002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.02.028.5.2] Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor					
5222002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	600.000,00	600.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		600.000,00	600.000,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.02.030.5.2] Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer - Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer					
5222005	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	37.250.000,00	37.250.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		37.250.000,00	37.250.000,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.03.002.5.2] Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya					
5221204	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.05.001.5.2] Pendidikan dan pelatihan formal - Pendidikan dan pelatihan formal					
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	263.437.500,00	263.067.080,00	370.420,00	100%
5221701	Belanja kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	45.000.000,00	44.875.000,00	125.000,00	100%
Sub Jumlah		308.437.500,00	307.942.080,00	495.420,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.05.004.5.2] Penilaian angka kredit - Penilaian angka kredit					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	24.000.000,00	22.350.000,00	1.650.000,00	93%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	466.400,00	466.400,00	0,00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	452.100,00	452.100,00	0,00	100%
5220603	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	660.000,00	660.000,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	3.933.000,00	3.933.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		30.941.500,00	29.291.500,00	1.650.000,00	95%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.06.001.5.2] Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi					



kinerja SKPD					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	494.800,00	494.800,00	0,00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1.237.500,00	1.237.500,00	0,00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	179.100,00	179.100,00	0,00	100%
5220602	Belanja Penjilidan	225.000,00	225.000,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	1.704.300,00	1.704.300,00	0,00	100%
Sub Jumlah		3.840.700,00	3.840.700,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.06.002.5.2] Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - Penyusunan pelaporan keuangan semesteran					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	549.800,00	549.800,00	0,00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1.127.500,00	1.127.500,00	0,00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	228.600,00	228.600,00	0,00	100%
5220602	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	1.311.000,00	1.311.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		3.366.900,00	3.366.900,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.06.005.5.2] Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	718.100,00	718.100,00	0,00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	880.000,00	880.000,00	0,00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	161.100,00	161.100,00	0,00	100%
5220602	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	1.311.000,00	1.311.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		3.220.200,00	3.220.200,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.06.019.5.2] Penyusunan Renja SKPD -					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	718.100,00	718.100,00	0,00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	880.000,00	880.000,00	0,00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	161.100,00	161.100,00	0,00	100%
5220602	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	1.311.000,00	1.311.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		3.220.200,00	3.220.200,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.06.021.5.2] Penyusunan program kerja pengawasan tahunan -					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	534.300,00	534.300,00	0,00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	605.000,00	605.000,00	0,00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	215.400,00	215.400,00	0,00	100%
5220602	Belanja Penjilidan	150.000,00	150.000,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	2.622.000,00	2.622.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		4.126.700,00	4.126.700,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.002.5.2] Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah - Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	100%



5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	756.430.000,00	738.570.000,00	17.860.000,00	98%
Sub Jumlah		764.780.000,00	746.920.000,00	17.860.000,00	98%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.004.5.2] Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya -					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.505.000,00	2.505.000,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	986.700,00	986.700,00	0,00	100%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	68.840.000,00	61.370.000,00	7.470.000,00	89%
Sub Jumlah		72.331.700,00	64.861.700,00	7.470.000,00	90%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.005.5.2] Inventarisasi temuan pengawasan -					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	20.510.000,00	20.510.000,00	0,00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	578.980,00	578.980,00	0,00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	100%
5220210	Belanja Bahan Dekorasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	1.890.600,00	1.890.600,00	0,00	100%
1	2	3	13	14	
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	11.799.000,00	11.799.000,00	0,00	100%
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	35.528.100,00	35.528.100,00	0,00	100%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	185.525.000,00	183.954.218,00	1.570.782,00	99%
Sub Jumlah		259.871.680,00	258.300.898,00	1.570.782,00	99%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.008.5.2] Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan - Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	835.000,00	835.000,00	0,00	100%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	99.730.000,00	99.730.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		100.565.000,00	100.565.000,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.009.5.2] Audit Alokasi Dana Desa -					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	100%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	478.080.000,00	478.070.000,00	10.000,00	100%
Sub Jumlah		487.730.000,00	487.720.000,00	10.000,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.010.5.2] Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah - Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	772.800,00	772.800,00	0,00	100%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	74.700.000,00	68.975.000,00	5.725.000,00	92%
Sub Jumlah		77.122.800,00	71.397.800,00	5.725.000,00	93%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.011.5.2] Evaluasi LAKIP - Evaluasi LAKIP					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	100%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	398.765.000,00	382.515.000,00	16.250.000,00	96%



Sub Jumlah		408.415.000,00	392.165.000,00	16.250.000,00	96%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.012.5.2] Pemeliharaan program SIMHP - Pemeliharaan program SIMHP					
5220311	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.013.5.2] Inventarisasi penetapan TPTGR - Inventarisasi penetapan TPTGR					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00	0%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	450.600,00	0,00	450.600,00	0%
1	2	3	13	14	
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	962.500,00	0,00	962.500,00	0%
5220601	Belanja Penggandaan	448.500,00	0,00	448.500,00	0%
5220602	Belanja Penjilidan	450.000,00	0,00	450.000,00	0%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	5.244.000,00	0,00	5.244.000,00	0%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47.075.000,00	0,00	47.075.000,00	0%
Sub Jumlah		89.130.600,00	0,00	89.130.600,00	0%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.014.5.2] Review RKA SKPD - Review RKA SKPD					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	1.236.400,00	1.236.400,00	0,00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	330.000,00	330.000,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	2.622.000,00	2.622.000,00	0,00	100%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.950.000,00	31.900.000,00	1.050.000,00	97%
Sub Jumlah		38.788.400,00	37.738.400,00	1.050.000,00	97%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.015.5.2] Pencanaan zona integritas - Pencanaan zona integritas					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	678.500,00	678.500,00	0,00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	700.500,00	700.500,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	4.370.000,00	4.370.000,00	0,00	100%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.000.000,00	35.260.000,00	2.740.000,00	93%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.225.000,00	29.572.205,00	652.795,00	98%
Sub Jumlah		78.974.000,00	75.581.205,00	3.392.795,00	96%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.016.5.2] Sapu bersih pungutan liar - Sapu bersih pungutan liar					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	50%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	595.700,00	595.700,00	0,00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	1.797.300,00	1.797.300,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	6.992.000,00	6.992.000,00	0,00	100%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	59.015.000,00	57.470.000,00	1.545.000,00	97%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	16.960.000,00	16.780.000,00	180.000,00	99%
Sub Jumlah		90.360.000,00	86.135.000,00	4.225.000,00	95%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.017.5.2] Probit Audit - Probit Audit					



Audit					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	595.700,00	595.700,00	0,00	100%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.000.000,00	37.400.000,00	600.000,00	98%
Sub Jumlah		43.595.700,00	42.995.700,00	600.000,00	99%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.018.5.2] Penanganan laporan gratifikasi - Penanganan laporan gratifikasi					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	595.700,00	595.700,00	0,00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	1.051.200,00	1.051.200,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	2.359.800,00	2.359.800,00	0,00	100%
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.933.000,00	3.933.000,00	0,00	100%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	56.810.000,00	56.525.000,00	285.000,00	99%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.170.000,00	30.834.762,00	(2.664.762,00)	109%
Sub Jumlah		97.919.700,00	100.299.462,00	(2.379.762,00)	102%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.019.5.2] Penilaian mandiri reformasi birokrasi - Penilaian mandiri reformasi birokrasi					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	575.000,00	575.000,00	0,00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	920.000,00	920.000,00	0,00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	425.700,00	425.700,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	3.933.000,00	3.933.000,00	0,00	100%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.550.000,00	25.878.398,00	2.671.602,00	91%
Sub Jumlah		34.403.700,00	31.732.098,00	2.671.602,00	92%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.020.5.2] Pelaksanaan penguatan dan evaluasi penerapan SPIP - Pelaksanaan penguatan dan evaluasi penerapan SPIP					
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	3.933.000,00	2.622.000,00	1.311.000,00	67%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.435.000,00	26.125.000,00	310.000,00	99%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.480.000,00	7.895.000,00	585.000,00	93%
Sub Jumlah		38.848.000,00	36.642.000,00	2.206.000,00	94%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.021.5.2] Laporan LHKPN/LHAKSN - Laporan LHKPN/LHAKSN					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	345.000,00	345.000,00	0,00	100%
1	2	3	13	14	433%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	1.311.000,00	1.311.000,00	0,00	100%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	92.155.000,00	91.150.000,00	1.005.000,00	99%
Sub Jumlah		98.811.000,00	97.806.000,00	1.005.000,00	99%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.022.5.2] Pelaksanaan pengawasan internal berkala pada Dinas dan LTD - Pelaksanaan pengawasan internal berkala pada Dinas dan LTD					



5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	100%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	417.585.000,00	417.585.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		427.235.000,00	427.235.000,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.027.5.2] Review Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah - Review Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	595.700,00	595.700,00	0,00	100%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.000.000,00	37.125.000,00	875.000,00	98%
Sub Jumlah		38.595.700,00	37.720.700,00	875.000,00	98%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.033.5.2] Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala pada Kecamatan dan Kelurahan - Pelaksanaan Pengawasan Internal Berkala pada Kecamatan dan Kelurahan					
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	174.060.000,00	174.025.000,00	35.000,00	100%
Sub Jumlah		174.060.000,00	174.025.000,00	35.000,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.034.5.2] Layanan aspirasi pelayanan online rakyat sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N) - Lapor (SPAN)					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	100%
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	2.327.600,00	2.327.600,00	0,00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	3.712.500,00	3.712.500,00	0,00	100%
5220304	Belanja Jasa Talk Show (Siaran)/Iklan/pengumuman Media	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0%
5220601	Belanja Pengandaan	330.000,00	330.000,00	0,00	100%
5220602	Belanja Penjilidan	75.000,00	75.000,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	1.311.000,00	1.311.000,00	0,00	100%
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.933.000,00	3.933.000,00	0,00	100%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	86.345.000,00	81.708.760,00	4.636.240,00	95%
5222006	Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100%
1	2	3	13	14	
Sub Jumlah		274.934.100,00	263.297.860,00	11.636.240,00	96%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.035.5.2] Monitoring/ Tindak Lanjut Pengawasan - Monitoring/ Tindak Lanjut Pengawasan					
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.650.000,00	9.650.000,00	0,00	100%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	350.930.000,00	350.495.000,00	435.000,00	100%
Sub Jumlah		360.580.000,00	360.145.000,00	435.000,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.036.5.2] Audit Manajemen Kepegawaian - Audit Manajemen Kepegawaian					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	595.700,00	595.700,00	0,00	100%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.000.000,00	37.400.000,00	600.000,00	98%
Sub Jumlah		38.595.700,00	37.995.700,00	600.000,00	98%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.037.5.2] Audit Tata Kelola Teknologi Informasi - Audit Tata Kelola Teknologi					



Informasi					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	595.700,00	595.700,00	0,00	100%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.000.000,00	37.675.000,00	325.000,00	99%
Sub Jumlah		38.595.700,00	38.270.700,00	325.000,00	99%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.038.5.2] Pengawasan dana bantuan operasional sekolah (BOS) -					
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	199.420.000,00	196.130.000,00	3.290.000,00	98%
Sub Jumlah		199.420.000,00	196.130.000,00	3.290.000,00	98%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.039.5.2] Pengawasan dana alokasi khusus (DAK) -					
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	200.000.000,00	199.205.000,00	795.000,00	100%
Sub Jumlah		200.000.000,00	199.205.000,00	795.000,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.041.5.2] Audit Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2019 -					
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	164.925.000,00	164.925.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		164.925.000,00	164.925.000,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.17.042.5.2] Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) -					
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	2.709.400,00	1.966.500,00	742.900,00	73%
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41.400.000,00	41.250.000,00	150.000,00	100%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55.570.000,00	55.562.100,00	7.900,00	100%
1	2	3	13	14	
Sub Jumlah		99.679.400,00	98.778.600,00	900.800,00	99%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.18.001.5.2] Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan - Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan					
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	126.850.000,00	126.796.300,00	53.700,00	100%
5221701	Belanja kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	54.400.000,00	50.245.000,00	4.155.000,00	92%
Sub Jumlah		181.250.000,00	177.041.300,00	4.208.700,00	98%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.18.002.5.2] Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja - Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja					
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	283.430.000,00	280.263.878,00	3.166.122,00	99%
5221701	Belanja kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	86.500.000,00	70.790.000,00	15.710.000,00	82%
Sub Jumlah		369.930.000,00	351.053.878,00	18.876.122,00	95%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.18.003.5.2] Peningkatan kapabilitas sumber daya aparatur pengawasan - Peningkatan kapabilitas sumber daya aparatur pengawasan					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	9.830.000,00	9.830.000,00	0,00	100%
5210106	Honorarium Pengajar / Instruktur / Narasumber / Pelatih	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	100%



5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	2.285.420,00	2.285.420,00	0,00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	352.000,00	352.000,00	0,00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	862.500,00	862.500,00	0,00	100%
5220602	Belanja Penjilidan	148.500,00	148.500,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	1.398.400,00	1.398.400,00	0,00	100%
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.277.500,00	3.277.500,00	0,00	100%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	170.700.000,00	166.902.400,00	3.797.600,00	98%
5222501	Belanja Transportasi	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0%
5222502	Belanja Akomodasi	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0%
Sub Jumlah		202.454.320,00	194.656.720,00	7.797.600,00	96%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.18.004.5.2] Pelaksanaan penguatan kapabilitas APIP - Pelaksanaan penguatan kapabilitas APIP					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	575.000,00	575.000,00	0,00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	920.000,00	920.000,00	0,00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	399.900,00	399.900,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	665.000,00	665.000,00	0,00	100%
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	23.730.000,00	23.715.000,00	15.000,00	100%
Sub Jumlah		26.289.900,00	26.274.900,00	15.000,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.19.002.5.2] Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan - Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	262.300,00	262.300,00	0,00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	283.500,00	283.500,00	0,00	100%
5220602	Belanja Penjilidan	105.000,00	105.000,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	1.311.000,00	1.311.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		1.961.800,00	1.961.800,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.19.003.5.2] Penyusunan laporan pelaksanaan program pengawasan semesteran dan tahunan - Penyusunan laporan pelaksanaan program pengawasan semesteran dan tahunan					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	255.000,00	255.000,00	0,00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	797.500,00	797.500,00	0,00	100%
5220601	Belanja Penggandaan	274.500,00	274.500,00	0,00	100%
5220602	Belanja Penjilidan	55.000,00	55.000,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	874.000,00	874.000,00	0,00	100%
Sub Jumlah		2.256.000,00	2.256.000,00	0,00	100%
[DPPA - 0.4.05.0.4.05.05.00.24.018.5.2] Pameran pembangunan -					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	2.383.600,00	2.383.600,00	0,00	100%
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	2.462.500,00	2.462.500,00	0,00	100%
5220210	Belanja Bahan Dekorasi	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	100%
5220801	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100%
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	9.832.500,00	9.832.500,00	0,00	100%
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.341.600,00	7.341.600,00	0,00	100%



Sub Jumlah	42.520.200,00	42.520.200,00	0,00	100%
Jumlah	14.789.676.891,00	13.671.517.016,00	1.118.159.875,00	92%

2) Anggaran dan Realisasi Program dan Sasaran Strategis Tahun 2019

Upaya yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan keberhasilan visi dan misi dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Sintang tahun 2017-2021 dilaksanakan dengan program dan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.159.596.599,00 dari target sebesar Rp. 5.702.111.100,00 atau 90,48% dengan kriteria sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya Profesionalisme dan Kapasitas Aparat Pengawas					
Program	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
Meningkatnya Profesionalisme dan kapasitas Aparat Pengawas.	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	181.250.000	181.250.000	177.041.300	97,68 %
	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian akuntabilitas Kinerja	381.430.000	369.930.000	351.053.878	94,90 %
	Peningkatan Kapabilitas Sumber daya Aparatur	66.754.320	202.454.320	194.656.720	96,15 %
TOTAL		629.434.320	753.634.320	722.751.898	96,24 %
Sasaran 2 Meningkatnya Jumlah Regulasi/Kebijakan Pengawasan Yang Diterbitkan					
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1.953.500	1.953.500	-	0
TOTAL		1.953.500	1.953.500	-	0
Sasaran 3 Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan					
Program Peningkatan Sistem Pengawasan	Monitoring/ Pemantauan Tindak Lanjut	360.580.000	360.580.000	360.145.000	99,88



Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Inventarisasi Temuan Pengawasan	259.871.680	259.871.680	258.300.898	99,40
	Pemeliharaan Program SIMHP	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100
	Inventarisasi Penetapan TPTGR	96.880.600	89.130.600	0	0
TOTAL		723.332.280	715.582.280	624.445.898	74,82

Sasaran 4 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pengawasan Berkala

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala pada dinas dan lembaga teknis daerah	487.235.000	427.235.000	427.235.000	100%
	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala pada kesekretariatan, kecamatan dan kelurahan	174.060.000	174.060.000	174.025.000	99%
	Audit Alokasi Dana Desa	487.730.000	487.730.000	487.720.000	99%
	Reviu RKA	38.788.400	38.788.400	37.738.400	97,2%
	Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK)	200.000.000	200.000.000	199.205.000	99,6%
	Audit Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2019	-	164.925.000	164.925.000	100%
	Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	199.420.000	199.420.000	196.130.000	98,35 %
	Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	38.5995.700	38.5995.700	37.720.700	97,7%
	Pelaksanaan Penguatan dan Evaluasi Penerapan SPIP	38.848.000	38.848.000	36.642.000	94,32 %
	Audit Manajemen Kepegawaian	38.595.700	38.595.700	37.995.700	98,44 %
	Audit Tata Kelola Teknologi Informasi	38.595.700	38.595.700	38.270.700	99,15 %



	Evaluasi Berkala Hasil Temuan Pengawasan	100.565.000	100.565.000	100.565.000	100%
	Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Reviu Rencana Kerja Pembanguna Daerah (RKPD)	-	99.679.400	98.778.600	99%
TOTAL		2.189.833.500	2.036.951.100	2.036.951.100	98,59 %
Sasaran 5 Meningkatnya Penyelesaian Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Dengan Pemeriksaan					
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Laporan Pemeriksaan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah	1.030.480.000	764.780.000	746.920.000	97,66
	Jumlah Laporan Penangan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintahan dibawahnya	72.331.700	72.331.700	64.861.700	89,67
	Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)	274.934.100	274.934.100	263.297.860	85,94
	TOTAL	1.377.745.800	1.112.045.800	1.075.079.560	91,09
Sasaran 6 Meningkatnya Hasil Evaluasi SAKIP SKPD					
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian	Laporan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP	408.415.000	408.415.000	392.165.000	96,02
	Reviu Laporan Keuangan dan	77.122.800	77.122.800	71.397.800	92,57



Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kinerja Pemerintah Daerah				
TOTAL		485.537.800	485.537.800	463.562.800	94,29
Sasaran 7 Meningkatnya SKPD yang Bebas Korupsi					
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pencanangan Zona Integritas	102.199.000	78.974.000	75.581.205	95,70 %
	Laporan LHKPN/LHKASN	75.571.000	98.811.000	97.806.000	98,98 %
	Sapu Bersih Pungutan Liar	90.360.000	90.360.000	88.135.000	97,53 %
	Probity Audit	43.595.700	43.595.700	42.995.700	98,62 %
	Penanganan Laporan Gratifikasi	97.919.700	97.919.700	97.919.700	100%
	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	34.403.700	34.403.700	31.732.098	92,23 %
	Pelaksanaan Penguatan dan Evaluasi Penerapan SPIP	38.848.000	38.848.000	36.642.000	94,32 %
	TOTAL		482.897.100	482.912.100	470.811.703
SUB TOTAL		5.890.734.300	5.702.111.100	5.159.596.599	90,48 %



BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019 secara umum dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sintang Tahun 2019 merupakan media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban serta dana yang dipergunakan selama tahun 2019.

Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 7 (tujuh) sasaran dan 15 (lima belas) indikator kinerja langkah-langkah outcome, secara keseluruhan telah mencapai dengan kategori sangat berhasil. Secara umum keberhasilan sasaran tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya komitmen dan kesadaran untuk meningkatkan kinerja dari seluruh Jajaran Inspektorat Kabupaten Sintang serta meningkatnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan.

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan banyak ditemui hambatan/kendala. Adapun langkah-langkah antisipasi dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada tahun mendatang adalah:

1. Mengirim PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti diklat sertifikasi Jabatan Fungsional maupun diklat struktural dan teknis.
2. Mengadakan penambahan sarana dan prasarana pendukung guna menunjang kegiatan pemeriksaan.
3. Menyusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) sesuai dengan skala prioritas / berbasis resiko.
4. Menyusun program kerja pemeriksaan berdasarkan skala prioritas.
5. Melaksanakan monitoring dan pemutahiran data terhadap temuan-temuan pengawasan yang belum ditindaklanjuti, serta dilakukan kegiatan gelar pengawasan yang direncanakan 2 (dua) kali setahun.
6. Meningkatkan koordinasi antara anggota TP-TGR agar kasus-kasus pelanggaran yang penyelesaiannya direkomendasikan melalui jalur TP-TGR dapat segera ditindaklanjuti.



Akhirnya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan acuan atau bahan evaluasi bagi perbaikan kinerja Inspektorat Kabupaten Sintang sehingga dapat lebih ditingkatkan.

☞☞☞

**PENGUKURAN KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Sasaran 1 : Meningkatnya Profesionalisme dan Kapasitas Aparat Pengawas

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	Jumlah Aparat Pengawas (Pejabat Fungsional)	Orang	49	49	100	Output
2	Jumlah Aparat Pengawas yang mengikuti diklat teknis dan kapabilitas sumber daya Aparatur Pengawasan	Orang	60 JFA 14 Non JFA	49 JFA 16 Non JFA	87,83	Output
Capaian Sasaran					93,91	

Sasaran 2: Meningkatnya Jumlah Regulasi/Kebijakan Pengawasan Yang Diterbitkan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah Regulasi/Kebijakan Pengawasan	Regulasi	2	2	100%	Output
Capaian sasaran					100%	

Sasaran 3: Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Prosentase Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan	%	80	68,20	68,20	Outcome

	yang selesai ditindaklanjuti					
2.	Prosentase Kerugian Daerah yang selesai ditindaklanjuti	%	47	47,53	100,12	Output
3.	Jumlah inventarisasi Penetapan TP-TGR (Sidang TP-TGR)	Kegiatan	1	0	0	Output
4.	Peningkatan Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Aplikasi	1	1	100	Output
Capaian sasaran					67,08%	

Sasaran 4: Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pengawasan Berkala

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah Objek pemeriksaan berkala yang diperiksa	Obrik	125	213	170,4%	Outcome
Capaian sasaran					170,4%	

Sasaran 5: Meningkatnya Penyelesaian Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Dengan Pemeriksaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Prosentase kasus/khusus yang diperiksa	%	60	92,5	92,5%	Outcome
Capaian sasaran					92,5%	

Sasaran 6 : Meningkatkan Hasil Evaluasi SAKIP SKPD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah SKPD yang dievaluasi	%	100	100	100	Outcome
2..	Jumlah SKPD dengan nilai SAKIP kategori Baik	SKPD	30	6	20	Output
Capaian sasaran					60%	

Sasaran 7 : Meningkatkan SKPD yang Bebas Korupsi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1.	Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	SKPD	43	100	100	Output
2.	Jumlah SKPD yang menerapkan WASKAT	SKPD	43	100	100	Output
3.	Jumlah SKPD yang diusulkan sebagai Zona Integritas atau berstatus WBK/WBBM	SKPD	3	0	0	Output
4.	Prosentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN	Persentase	80%	82,5	103,1	Output
Capaian sasaran					75,77%	

Jumlah anggaran untuk kegiatan strategis : **5.702.111.100,00**

Jumlah realisasi anggaran kegiatan strategis : **5.159.596.599,00**



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

INSPEKTORAT KABUPATEN

JalanPangeranDiponegoro No.01 SintangProvinsi Kalimantan Barat

Telp. (0565) 21008 Fax (0565) 21738

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : APOLONARIS BIONG, S.Sos, M.Si

Jabatan : Inspektur Kabupaten Sintang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. H. JAROT WINARNO, M.Med, Ph.

Jabatan : Bupati Sintang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
BUPATI SINTANG

dr. H. JAROT WINARNO, M.Med, PH.

Sintang, Februari 2019
Pihak Pertama,
INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG

APOLONARIS BIONG, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19600723 198011 1 001

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG

	Indikator Kinerja Utama	Rumusan Indikator	Target	Satuan	Keterangan
1	2	3		5	6
Sasaran 1 Meningkatnya Profesionalisme dan kapasitas Aparat Pengawas					
1.	Jumlah Aparat Pengawas (Pejabat Fungsional)	Jumlah Aparat Pengawas (Pejabat Fungsional)	49	Orang	Output
2.	Jumlah Aparat Pengawas yang mengikuti diklat teknis dan kapabilitas sumber daya Aparatur Pengawasan	Jumlah Aparat yang mengikuti diklat	60 JFA 14 Non JFA	Orang	Output
Sasaran 2 Meningkatnya Jumlah Regulasi/Kebijakan Pengawasan Yang Diterbitkan					
1.	Jumlah Regulasi/Kebijakan Pengawasan	Jumlah Regulasi/Kebijakan Pengawasan yang diterbitkan	2	Regulasi	Output
Sasaran 3 Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan					
1.	Prosentase Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	80%	Persentase	Outcome
2.	Prosentase Kerugian Daerah yang selesai ditindaklanjuti	Jumlah Kerugian Daerah yang selesai ditindaklanjuti	47%	Persentase	Output
3.	Jumlah inventarisasi Penetapan TP-TGR (Sidang TP-TGR)	Jumlah inventarisasi Penetapan TP-TGR (Sidang TP-TGR) yang dilaksanakan	1	Kegiatan	Output
4.	Peningkatan Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah Sistem Informasi Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang dipelihara	1	Aplikasi	Output
Sasaran 4 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pengawasan Berkala					
1.	Jumlah Objek pemeriksaan berkala yang diperiksa	Jumlah Objek pemeriksaan berkala yang diperiksa	125	Obrik	Output
Sasaran 5 Meningkatnya Penyelesaian Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti Dengan Pemeriksaan					
1.	Prosentase kasus/khusus yang diperiksa	Jumlah kasus/khusus yang diperiksa	60%	Persentase	Outcome
Sasaran 6 Meningkatnya Hasil Evaluasi SAKIP SKPD					
1.	Jumlah SKPD yang dievaluasi	Jumlah SKPD yang dievaluasi	100%	Persentase	Outcome
2.	Jumlah SKPD dengan nilai SAKIP kategori Baik	Jumlah SAKIP SKPD berkategori Baik	30	SKPD	Output
Sasaran 7 Meningkatnya SKPD Yang Bebas Korupsi					
1.	Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	43	SKPD	Output
2.	Jumlah SKPD yang menerapkan WASKAT	Jumlah SKPD yang menerapkan WASKAT	43	SKPD	Output
3.	Jumlah SKPD yang diusulkan sebagai Zona Integritas atau berstatus WBK/WBBM	Jumlah SKPD berstatus WBK/WBBM	3	SKPD	Output
4.	Prosentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN	Pejabat yang telah menyampaikan LHKPN	80%	Persentase	Output

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.218.851.000,00	APBD
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 685.749.000,00	APBD
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 77.000.000,00	APBD
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp. 17.774.700,00	APBD
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 339.379.000,00	APBD
6. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp. 4.804.267.880,00	APBD
7. Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Rp. 779.924.220,00	APBD
8. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Rp. 4.217.800,00	APBD
9. Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah	Rp. 42.520.200,00	APBD
Total	Rp. 7.969.683.800,00	APBD

Sintang, Februari 2019

Pihak Kedua,
BUPATI SINTANG

dr. H. JAROT WINARNO, M.Med, PH.

Pihak Pertama,
INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG

APOLONARIS BIONG, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19600723 198011 1 001